

Sedangkan penjabaran program prioritas seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022-2024, tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 7.4.
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tegal Tahun 2022-2024

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
XX	NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.348.243.698		1.412.243.562		1.424.635.764		4.185.123.023	SEMUA OPD
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	100	663.016.233	100	663.016.233	100	676.276.558	100	2.002.309.024	DINAS DIKBUD
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	7.276.416	100	8.004.058	100	8.804.463	100	24.084.937	DINAS KESEHATAN
		Persentase capaian kinerja mutu puskesmas	Jumlah persentase capaian kinerja puskesmas dibagi jumlah puskesmas (29 Puskesmas) dikali 100%	Persen, tahunan	38,00	46,00	85.000.000	50,00	85.000.000	54,00	87.550.000	100	257.550.000	DINAS KESEHATAN
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	26.975.560	100	26.975.560	100	27.784.827	100	81.735.947	RSUD dr SOESELO
		Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo		Grade Sesuai Permenkes 1164 Tahun 2007	78,46 (AA)	82 (AA)	137.990.864	86 (AA)	137.990.864	90 (AA)	142.130.589	90 (AA)	418.112.316	RSUD dr SOESELO

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	5.838.651	100	5.838.651	100	6.013.811	100	17.691.113	RSUD SURADADI
		Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi		Grade Sesuai Permenkes 1164 Tahun 2007	74,06 (A)	76,16 (A)	22.075.000	77,26 (A)	22.075.000	78,36 (A)	22.737.250	78,36 (A)	66.887.250	RSUD SURADADI
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	16.705.624	100	16.705.624	100	16.705.624	100	50.116.872	DPU
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Perkintaru	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	6.746.556	100	6.746.556	100	6.948.953	100	20.442.065	DINAS PERKIMTARU
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Satpol PP	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	6.466.849	100	6.466.849	100	6.660.854	100	19.594.552	SATPOL PP
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan BPBD	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	2.979.735	100	2.979.735	100	3.069.127	100	9.028.597	BPBD
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Sosial	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	2.574.754	100	2.574.754	100	2.651.997	100	7.801.505	DINAS SOSIAL

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	3.602.809	100	3.845.369	100	4.109.026	100	11.557.204	DINAS P3AP2KB
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DLH	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	5.030.614	100	5.030.614	100	5.181.532	100	15.242.760	DLH
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	7.177.448	100	7.177.448	100	7.392.771	100	21.747.667	DISDUKCAPIL
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pemasdes	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	3.544.587	100	3.544.587	100	3.650.925	100	10.740.099	DISPERMASDES
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	4.187.563	100	4.187.563	100	4.313.190	100	12.688.316	DISHUB
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kominfo	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	3.464.617	100	3.464.617	100	3.568.556	100	10.497.790	DINAS KOMINFO
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	3.338.753	100	3.338.753	100	3.438.916	100	10.116.422	DINAS PMPTSP

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Disporapar	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	5.345.834	100	5.345.834	100	5.506.209	100	16.197.877	DISPORAPAR
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Arpus	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	3.090.980	100	3.090.980	100	3.183.709	100	9.365.669	DINAS ARPUS
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DKPP	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	4.295.970	100	4.295.970	100	4.424.849	100	13.016.789	DKPP
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Tan KP	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	12.870.403	100	12.870.403	100	13.256.515	100	38.997.321	DINAS TAN KP
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, Tahunan, Permendagri no 90/2019	100	100	9.055.921	100	9.055.921	100	9.327.599	100	27.439.441	DINAS DAGKOP UKM
		Presentase pemenuhan layanan penunjang pemerintahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	9.118.556	100	9.118.556	100	9.392.113	100	27.629.225	DISPERINAKER

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah dibanding jumlah Administrasi Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah di kali 100	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	19.910.274	100	19.910.274	100	20.507.582	100	60.328.130	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan sesuai standar dan administrasi pelayanan kepegawaian tepat waktu	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan sesuai standar dan Administrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu dibanding jumlah pemenuhan sarana prasarana kantor dan rumah jabatan dan administrasi layanan kepegawian dikali 100	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100		100		100		100	-	SEKRETARIAT DAERAH
		Indeks Kepuasan Masyarakat Komponen	Rerata Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai, tahunan Praturan Menteri PANRB 14/2017 IKU OPD	80,83	82,15		84,83		86,20		86,20	-	SEKRETARIAT DAERAH
		Predikat Nilai SAKIP Komponen	Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB	Nilai, tahunan, peraturan Menteri PANRB 12/2015 ; IKU OPD	61,36	65,68		68,08		70,61		70,61	-	SEKRETARIAT DAERAH
		Nilai Reformasi Birokrasi Komponen	Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB dari Kementerian PANRB	Nilai, tahunan Peraturan Menteri PANRB 26/2020 IKU OPD	63,69	64,69		65,19		65,69		65,69	-	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat	Persentase terpublikasinya informasi kegiatan dan kebijakan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017; IKU OPD	100	100		100		100		100	-	SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase kegiatan seremonial pimpinan daerah yang terfasilitasi layanan keprotokolan sesuai SOP	Kegiatan seremonial pimpinan yang terfasilitasi layanan keprotokolan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017, IKU OPD	100	100		100		100		100	-	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum nilai SAKIP B (Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum yang memperoleh nilai SAKIP B (Baik) dibagi jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 12/2015; IKU OPD	80,00	82,50		85,00		85,50		85,50		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum yang sesuai standard (IKM Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum nilai IKM Baik dibagi jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum dengan nilai CC (Cukup Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum Indeks Reformasi Birokrasi CC (Cukup Baik) dibagi jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 26/2020; IKU OPD	-	25,00		50,00		75,00		75,00	-	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Sekretariat DPRD	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	6.542.252	100	6.542.252	100	6.738.520	100	19.823.024	SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Pimpinan DPRD	Jumlah layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Pimpinan DPRD yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Pimpinan DPRD	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	31.910.638	100	31.910.638	100	32.867.957	100	96.689.233	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Bappeda & Litbang	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	4.038.694	100	4.038.694	100	4.159.855	100	12.237.243	BAPPEDA DAN LITBANG
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BPKAD	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	167.565.710	100	230.595.373	100	213.960.880	100	612.121.963	BPKAD
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BAPPENDA	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	10.721.943	100	10.721.943	100	11.043.601	100	32.487.487	BAPPENDA
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKD	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	3.929.301	100	3.929.301	100	4.047.180	100	11.905.782	BKD
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Inspektorat	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	12.215.000	100	12.215.000	100	12.581.450	100	37.011.450	INSPEKTORAT

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Adiwerna	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.255.237	100	1.255.237	100	1.292.894	100	3.803.368	KECAMATAN ADIWERNA
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Balapulang	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.621.213	100	1.621.213	100	1.669.849	100	4.912.275	KECAMATAN BALAPULANG
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Bojong	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.503.829	100	1.503.829	100	1.548.944	100	4.556.602	KECAMATAN BOJONG
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Bumijawa	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.502.735	100	1.502.735	100	1.547.817	100	4.553.287	KECAMATAN BUMIJAWA
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Dukuhturi	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.422.186	100	1.422.186	100	1.464.852	100	4.309.224	KECAMATAN DUKUHTURI
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Dukuhwaru	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.520.637	100	1.520.637	100	1.566.256	100	4.607.530	KECAMATAN DUKUHWARU
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.509.779	100	1.509.779	100	1.555.072	100	4.574.630	KECAMATAN JATINEGARA

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Kedungbanteng	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.102.398	100	1.102.398	100	1.135.470	100	3.340.266	KECAMATAN KEDUNGABNTENG
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Kramat	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.187.995	100	2.187.995	100	2.253.635	100	6.629.625	KECAMATAN KRAMAT
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Lebaksiu	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.154.942	100	1.154.942	100	1.189.590	100	3.499.474	KECAMATAN LEBAKSIU
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Margasari	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.806.774	100	1.806.774	100	1.860.977	100	5.474.525	KECAMATAN MARGASARI
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbarang	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.469.007	100	1.469.007	100	1.513.077	100	4.451.091	KECAMATAN PAGERBARANG
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Pangkah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.321.891	100	1.321.891	100	1.361.548	100	4.005.330	KECAMATAN PANGKAH
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Slawi	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	6.181.969	100	6.181.969	100	6.367.428	100	18.731.366	KECAMATAN SLAWI

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Suradadi	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.457.340	100	1.457.340	100	1.501.060	100	4.415.740	KECAMATAN SURADADI
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Talang	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.629.057	100	1.629.057	100	1.677.929	100	4.936.043	KECAMATAN TALANG
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Tarub	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.406.524	100	1.406.524	100	1.448.720	100	4.261.768	KECAMATAN TARUB
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Warureja	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.576.011	100	1.576.011	100	1.623.291	100	4.775.313	KECAMATAN WARUREJA
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.010.065	100	2.010.065	100	2.070.367	100	6.090.497	BADAN KESBANGPOL
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						691.494.582		683.075.161		703.814.515		2.078.384.258	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						281.520.196		284.385.398		292.606.705		858.512.299	DINAS DIKBUD
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						247.572.563		249.998.289		257.498.237		755.069.089	DINAS DIKBUD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD di bagi jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100%.	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	79,86	79,88		79,89		79,90		79,90		DINAS DIKBUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten bersangkutan dikali 100%.	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	97,25	97,27		97,28		97,29		97,29		DINAS DIKBUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD di bagi jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	107,03	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS DIKBUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD di bagi jumlah anak usia 3-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	105,99	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS DIKBUD
		Rata-rata Nilai Kelulusan SD	Proporsi jumlah nilai ujian terhadap jumlah mapel ujian SD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	77.47	76,00		77,00		78,00		78,00		DINAS DIKBUD
		Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	Proporsi jumlah nilai ujian terhadap jumlah mapel ujian SMP	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	70.86	73.36		74.5		75.75		75.75		DINAS DIKBUD
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						140.000		141.400		145.642		427.042	DINAS DIKBUD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase Muatan Lokal dalam KBM	Proporsi jam tatap muka muatan lokal terhadap jumlah jam tatap muka per minggu	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		DINAS DIKBUD
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						33.807.633		34.145.709		34.859.826		102.813.168	DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Kelas PAUD	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	23	22		15		16		16,00		DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Kelas TK	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	3,16	4,61		5,82		7,03		7,03		DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Kelas SD	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	19.11	1.40		1.30		1.20		1.20		DINAS DIKBUD
		Guru Mapel PAI	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	3.00	2.40		1.90		1.40		1.40		DINAS DIKBUD
		Guru Mapel PJOK	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	2.90	2.40		1.90		1.40		1.40		DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Mapel SMP	Perbandingan jumlah guru dikali jam wajib mengajar terhadap jumlah rombel	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	27,19	27,85		26,01		24,17		24,17		DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Mapel Paket A	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	1,26	1,26		1,26		1,26		1,26		DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Mapel Paket B	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,95	0,95		0,95		0,95		0,95		DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Mapel Paket C	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,76	0,76		0,76		0,76		0,76		DINAS DIKBUD
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								50.000		51.500		101.500	DINAS DIKBUD
		Persentase Satuan Pendidikan Berizin	Proporsi sekolah yang berijin operasional terhadap jumlah sekolah	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		DINAS DIKBUD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						-		50.000		51.500		101.500	DINAS DIKBUD
		Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah	Proporsi penggunaan bahasa Tegal dalam pembelajaran disekolah	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	50	60		65		70		70		DINAS DIKBUD
1.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN						169.721.933		171.419.153		175.066.345		516.207.431	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						148.057.566		149.538.142		152.528.904		450.124.612	DINAS KESEHATAN
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan dibagi jumlah penduduk di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	0,092	0,096		0,098		0,100		0,100		DINAS KESEHATAN
		Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi dibagi jumlah RS di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	88,90	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah ibu hamil di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	93,30	98,00		99,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	98,20	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	99,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah balita di kabupaten/ kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	73,70	91,00		92,00		93,00		93,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	38,90	55,00		60,00		65,00		65,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi jumlah orang usia 15 - 59 tahun di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	15,40	30,00		35,00		40,00		40,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	33,60	56,00		57,00		58,00		58,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	10,100	30,00		35,00		40,00		40,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita DM di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	74,50	79,00		80,00		81,00		81,00		DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	57,30	70,00		75,00		80,00		80,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah terduga TBC di kabupaten kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	57,10	70,00		75,00		80,00		80,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikali	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	90,50	95,00		98,00		98,00		98,00		DINAS KESEHATAN
		Cakupan balita stunting	Jumlah balita stunting dibagi jumlah seluruh balita dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	12,50	12,30		12,20		12,00		12,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terakreditasi	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (selain rumah sakit) yang terakreditasi dibagi jumlah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	42,00	63,00		90,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						100.000		101.000		104.030		305.030	DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah rekomendasi perijinan praktik tenaga kesehatan dibagi jumlah pengajuan perijinan praktik tenaga	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	Jumlah puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis dibagi jumlah seluruh puskesmas dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	83,00	89,60		93,10		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						795.000		802.950		827.039		2.424.989	DINAS KESEHATAN
		Persentase sarana produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan	Jumlah sarana produksi pangan industri rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan dibagi jumlah seluruh sarana produksi pangan industri rumah tangga	Persen; Tahunan; IKU OPD	30,00	36,00		39,00		42,00		42,00		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi persyaratan perijinan dibagi jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang mengajukan ijin dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						20.769.367		20.977.061		21.606.372		63.352.800	DINAS KESEHATAN
		Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) strata sehat utama ditambah sehat paripurna dibagi jumlah rumah tangga yang dipantau dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	95,40	95,60		95,70		95,80		95,80		DINAS KESEHATAN
1.03	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						215.103.077		199.814.108		204.185.748		619.102.933	DPU

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						6.000.000		6.060.000		6.241.800		18.301.800	DPU
		Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	Panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi panjang irigasi kewenangan kabupaten dikali 100%	Persen; Kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/492 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten; Jumlah 208 DI; Luas 9.281 Ha; Panjang Sal.	58,86	61,33		62,57		63,80		63,80		DPU
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						6.611.202		6.677.314		6.877.633		20.166.149	DPU
		Cakupan Akses Layanan Air Minum	Jumlah penduduk yang terakses layanan air minum dibagi jumlah penduduk kabupaten dikali 100%	Persen; Kumulatif; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014, PermenPUPR No 18/PRT/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	61,09	65,55		67,77		70,00		70,00		DPU
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						14.166.000		14.307.660		17.376.000		45.849.660	DPU
		Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	Jumlah Sarpras eksisting dibandingkan dengan Jumlah Sarpras Standar/Ideal sesuai Ketentuan	Jumlah; Kumultif; UU No. 18 Tahun 2008	78,00	82,00		83,00		85,00		85,00		DPU

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						2.749.320		2.776.813		6.930.000		12.456.133	DPU
		Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga Yang terakses Jaringan Sanitasi baik Individu maupun Komunal dibandingkan dengan Jumlah Rumah	Persen; Kumulatif; Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	94,37	95,57		95,97		96,37		96,37		DPU
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						11.050.000		11.160.500		11.495.315		33.705.815	DPU
		Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	Panjang Jalan yang berdrainase dibandingkan dengan panjang jalan kewenangan Kab.	Persen; kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km. 490,15 Km jalan harus berdrainase; 277,95 Km jalan yang berdrainase.	58,42	61,79		62,15		62,52		62,52		DPU
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						43.026.555		43.456.821		35.640.000		122.123.376	DPU
		Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	Jumlah bangunan negara yang sesuai standar teknis dibagi dengan jumlah bangunan negara di kabupaten dikali 100%	Persentase; Kumulatif; Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan	76,88	79,12		80,24		81,36		81,36		DPU

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Rasio bangunan yang memiliki IMB	Jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB dibagi jumlah bangunan gedung di Kabupaten Tegal	Persentase; Kumulatif; Data Perumahan Kabupaten Tegal & Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, Permen PUPR No 2 Tahun 2020	6,50	8,01		8,57		9,15		9,15		DPU
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						45.900.000		28.900.000		8.000.000		82.800.000	DPU
		Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata	panjang koridor jalan yang ditata dibagi dengan panjang koridor di wilayah perkotaan Slawi (Koridor 1 dan 2)	Persen, Kumulatif: IKU OPD	0,30	60,00		91,11		100,00		100,00		DPU
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						84.000.000		84.840.000		109.000.000		277.840.000	DPU
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan kondisi Baik (B) dan Sedang (S) dibagi dengan panjang jalan kewenangan Kab.	Persen; Kumulatif Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km.	81,11	84,00		85,50		87,50		87,50		DPU
		Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	Jumlah Jembatan kondisi Baik (B) dan Sedang (S) dibagi dibandingkan dengan jumlah jembatan kewenangan Kab.	Persen; Kumulatif Keputusan Bupati Tegal Nomor 630/394 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Jembatan di Kabupaten Tegal; Jumlah Jembatan 454 unit	88,05	91,00		92,00		93,50		93,50		DPU

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						1.000.000		1.010.000		2.000.000		4.010.000	DPU
		Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih dibandingkan jumlah penyedia jasa konstruksi yang terdaftar pada tahun	Persen ; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2019	0	80,00		80,00		80,00		80,00		DPU
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG						600.000		625.000		625.000		1.850.000	DPU
		Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	Jumlah permohonan ITR yang sesuai dengan peruntukan ruang dibanding jumlah ITR yang diajukan	Persen; Tahunan: IKU OPD	79,93	88,00		89,00		90,00		90,00		DPU
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						17.040.000		18.790.000		20.196.000		56.026.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						225.000		250.000		275.000		750.000	DINAS PERKIMTARU
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit korban bencana yang ditangani pada tahun n dibanding jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun	Persentase; Tahunan; PermenPUPR No 29/PRT/2018; Permendagri 18 Tahun 2020	100	100		100		100		100		DINAS PERKIMTARU
		Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin pada tahun n dibagi jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan di kabupaten pada tahun n dikali 100%	Persentase; Tahunan; IKU OPD	100	100		100		100		100		DINAS PERKIMTARU
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						4.600.000		5.200.000		5.356.000		15.156.000	DINAS PERKIMTARU

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan	Luas Kawasan Kumuh yang tertangani	Persen; Kumulatif; Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh di Kabupaten Tegal	35,47	45,72		50,48		55,97		55,97		DINAS PERKIMTARU
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						11.215.000		12.225.000		13.250.000		36.690.000	DINAS PERKIMTARU
		Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang tertangani dibandingkan dengan Jumlah RTLH	Persentase; Kumulatif; Perbup Kab. Tegal No 1/2020	13,06	17,98		20,79		23,60		23,60		DINAS PERKIMTARU
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						1.000.000		1.115.000		1.315.000		3.430.000	DINAS PERKIMTARU
		Persentase ketersediaan PSU perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU dibanding dengan jumlah lingkungan perumahan yang ada	Persentase; Kumulatif; IKU OPD	83,31	84,50		85,10		85,70		85,70		DINAS PERKIMTARU
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN						4.210.300		4.252.403		5.491.779		13.954.482	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						683.811		690.650		1.577.207		2.951.668	SATPOL PP
		Presentase gangguan trantibun yang tertangani	Jumlah pengaduan yg ditangani / jumlah pengaduan pelanggaran yg masuk X 100 %	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	82,00	86,00		88,00		90,00		90,00		SATPOL PP

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Presentase pelanggaran perda dan perkara yg diselesaikan	Jumlah perda / perkara yg memuat sanksi yg ditegakkan / jumlah keseluruhan perda/ perkara yg memuat sanksi (yang ditetapkan dalam 5 tahun terakhir	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	83,00	87,00		88,00		90,00		90,00		SATPOL PP
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						2.609.413		2.635.507		2.714.572		10.543.069	BPBD
		Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yg memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana / Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020	65,00	71,66		75,25		79,01		79,01		BPBD
		Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti pembinaan penanggulangan bencana / Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020	1,38	1,52		1,6		1,68		1,68		BPBD
		Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi / Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020	22,26	24,54		25,77		27,06		27,06		BPBD
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						917.076		926.247		1.200.000		3.043.323	SATPOL PP

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah pelayanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh perangkat daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dlm tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yg dibentuk dan atau di bawah pembinaan perangkat daerah pemadam kebakaran/ jumlah kejadian kebakaran dikab/kota x 100 %	Persen, Tahunan, permendagri 18 tahun 2020	79,00	88,00		90,00		100,00		100,00		SATPOL PP
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						3.899.076		4.414.099		6.267.938		14.581.113	DINAS SOSIAL
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						438.335		442.718		1.146.300		2.027.353	DINAS SOSIAL
		Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	Jumlah PSKS yang dibina dan diberdayakan dibagi jumlah seluruh PSKS	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	32,44	66,25		83,15		100,00		100,00		DINAS SOSIAL
01.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						100.000		100.000		103.000		303.000	DINAS SOSIAL
		Persentase Cakupan Fasitiasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan/ perdagangan orang	Persentase penangan warga migran korban tindak kekerasan/ perdagangan orang dibagi jumlah korban	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS SOSIAL
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						2.003.750		2.023.788		2.488.569		6.516.107	DINAS SOSIAL

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial dibagi jumlah target penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 Tahun 2019	29,39	62,62		81,15		100,00		100,00		DINAS SOSIAL
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						957.011		966.581		1.112.069		3.035.661	DINAS SOSIAL
		Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	Jumlah Penyandang PPKS (Fakir Miskin dan Anak Terlantar) yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial dasar dibagi Jumlah seluruh PPKS	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	97,99	99,21		100,00		100,00		100,00		DINAS SOSIAL
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						309.913		313.012		650.000		1.272.925	DINAS SOSIAL
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS SOSIAL
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						90.067		568.000		768.000		1.426.067	DINAS SOSIAL
		Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase sarana dan prasarana fasilitas taman makam pahlawan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	89,80	90,00		90,25		90,75		90,75		DINAS SOSIAL

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						80.636.953		83.958.148		89.643.351		254.238.452	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						1.099.308		1.309.320		2.250.100		4.658.728,0	DISPERINAKER
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						50.000		50.000		50.500		150.500	DISPERINAKER
		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	perbandingan jumlah kegiatan yang dilaksanakan terhadap jumlah total kegiatan yang ada di RTKD	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	100	100		100		100		100		DISPERINAKER
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						732.000		739.320		1.664.000		3.135.320	DISPERINAKER
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja = PDRB Harga Konstan dibagi Jumlah penduduk bekerja	Rasio; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	37.990	40.737		42.410		44.326		44.326		DISPERINAKER
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persentase TK Berkompeten = Jumlah TK bersertifikasi dibagi Jumlah tenaga kerja	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	3,70	5,50		6,40		6,70		6,70		DISPERINAKER
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						108.518		220.000		226.600		555.118	DISPERINAKER
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	Jumlah AKAD, AKAN , AKL dibanding jumlah pencari dikali 100 Persen	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	17,82	30,00		35,00		40,00		40,00		DISPERINAKER
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						208.790		300.000		309.000		817.790	DISPERINAKER
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	7,08	7,78		8,13		8,48		8,48		DISPERINAKER
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						628.950		1.061.978		1.200.026		2.890.954	DINAS P3AP2KB

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						87.400		225.109		254.373		566.882	DINAS P3AP2KB
		Persentase ARG pada belanja operasi APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi APBD dibagi jumlah seluruh belanja operasi APBD X 100%)	Kategori, Tahunan, APBD	26,84	28,00		29,00		30,00		30,00		DINAS P3AP2KB
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						323.950		431.064		487.102		1.242.116	DINAS P3AP2KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan termasuk TPPO dibagi jumlah penduduk perempuan	Rasio, Tahunan, Data SIMPONI	6,79	8,30		8,49		9,67		9,67		DINAS P3AP2KB
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						-		28.250		31.922		60.172	DINAS P3AP2KB
		Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	Jumlah Keluarga mendapat pelayanan konseling dibanding jumlah keluarga kali 100	Persen, Tahunan, Laporan Kunjungan	0,04	0,06		0,07		0,08		0,08		DINAS P3AP2KB
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						97.380		110.039		124.344		331.763	DINAS P3AP2KB
		Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia	Jumlah lembaga yang memberikan data gender dan anak dibagi jumlah keseluruhan lembaga X 100%	Persen; Tahunan; laporan SIGA	20,00	40,00		50,00		60,00		60,00		DINAS P3AP2KB
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						-		131.668		148.785		280.453	DINAS P3AP2KB
		Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	Jumlah nilai pemenuhan 24 indikator KLA dibagi 1000 dikali 100	Persen, Tahunan, IKU OPD	50,00	64,00		67,00		70,00		70,00		DINAS P3AP2KB
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						120.220		135.848		153.500		409.568	DINAS P3AP2KB

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi dibagi jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun	Persen, Tahunan, Data Simfoni PPPA	0,0076	0.0120		0.0130		0.0140		0.0140		DINAS P3AP2KB
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						316.921		328.874		338.741		984.536	DINAS TAN KP
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						222.200		224.422		231.155		677.777	DINAS TAN KP
		Persentase penguatan cadangan pangan	Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten / Standar Cadangan Beras Kabupaten	Persen; Tahunan; Permentan No. 11/2018, Permendagri 18 Tahun 2020	26,5	28,5		30		32,5		32,5		DINAS TAN KP
		Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	Nilai capaian ketersediaan informasi (K) adalah rata-rata dari nilai ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1), nilai ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan waktu (K3)	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT. 140/12/2010	48	50		51		52		52		DINAS TAN KP
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						37.768		38.146		39.290		115.204	DINAS TAN KP
		Persentase penanganan daerah rawan pangan	Jumlah Daerah Rawan Pangan tertangani dibanding Jumlah Daerah Rawan Pangan dikali 100%	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT. 140/12/2010	72,00	90,00		90,00		90,00		90,00		DINAS TAN KP

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN						56.953		66.307		68.296		191.555	DINAS TANKP
		Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi / Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT. 140/12/2010	90,00	80,00		83,00		85,00		85,00		DINAS TANKP
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						10.800.000		11.100.000		11.000.000		32.900.000	DINAS PERKIMTARU
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						9.800.000		10.100.000		9.500.000		29.400.000	DINAS PERKIMTARU
		Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas bidang tanah yang dibebaskan untuk pembangunan oleh Pemda dibagi dengan rencana luas lahan untuk pembangunan oleh pemda	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS PERKIMTARU
		Persentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat	Jumlah aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat dibagi dengan jumlah total lahan yang dimiliki oleh pemerintah	Persen; Kumulatif; IKU OPD	55,95	77,97		88,98		97,00		97,00		DINAS PERKIMTARU
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						500.000		500.000		500.000		1.500.000	DINAS PERKIMTARU
		Persentase implementasi redistribusi tanah	jumlah tahapan implementasi redistribusi tanah dibanding jumlah tahapan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0,00	30,00		60,00		100,00		100,00		DINAS PERKIMTARU

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
2.10.05	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						500.000		500.000		1.000.000		2.000.000	DINAS PERKIMTARU
		Persentase Tanah yang tertata	Jumlah tanah yang tertata (teridentifikasi kepemilikan, nilai, penggunaan) dibagi jumlah tanah keseluruhan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0	33,33		66,66		100,00		100,00		DINAS PERKIMTARU
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						18.322.816		14.687.820		14.872.820		47.883.456	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						405.000		300.000		320.000		1.025.000	DLH
		Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	Jumlah Dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup yang tersusun dibagi total keseluruhan dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup yang dibutuhkan periode RPJMD	Persen; Kumulatif; IKU OPD	11,11	55,56		77,78		100,00				DLH
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						150.000		585.000		300.000		1.035.000	DLH
		Nilai Peningkatan Status Mutu Air Sungai	Jumlah titik lokasi yang mengalami peningkatan status mutu air dibagi jumlah seluruh titik lokasi pengambilan sampel uji	Persen; Kumulatif; IKU OPD	3,70	7,41		11,11		14,81		14,81		DLH
		Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Jumlah luas lahan terkontaminasi yang dilakukan upaya pngendalian dibagi jumlah seluruh lahan yang terkontaminasi	Persen; Kumulatif; IKU OPD	1,08	9,76		16,84		18,6		18,6		DLH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						2.147.820		2.127.820		2.127.820		6.403.460	DLH
		Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	Jumlah areal RTH yang dikelola dibagi dengan total jumlah RTH	Persen, Tahunan; IKU OPD	0	34,72		37,50		38,89		38,89		DLH
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						225.000		350.000		275.000		850.000	DLH
		Persentase Penanganan Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen dibagi Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan rincian teknis penyimpanan limbah B3	Persen, Tahunan; IKU OPD	60,00	62,50		65,00		67,00		67,00		DLH
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						130.000		130.000		130.000		390.000	DLH
		Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen dibagi jumlah pelaku usaha yang diawasi	Persen, Tahunan; IKU OPD	30	40		45		50		50		DLH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						100.000		125.000		125.000		350.000	DLH
		Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	Jumlah Kelompok Masyarakat / Lembaga/ Komunitas yang Peduli Lingkungan Hidup pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah Kelompok Masyarakat / Lembaga/ Komunitas yang Peduli Lingkungan Hidup pada tahun penetapan Perubahan RPJMD (2021)	Jumlah; Kumulatif; IKU OPD	5,00	15,00		17,00		20,00		20,00		DLH
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						150.000		150.000		150.000		450.000	DLH
		Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat pada tahun berjalan dibagi jumlah kinerja masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang dilakukan penilaian	Jumlah; Kumulatif; IKU OPD	20,00	20,00		22,00		24,00		24,00		DLH
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						43.224		45.000		45.000		133.224	DLH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus PPLH yang diadakan masyarakat	Persen; Tahunan; IKU OPD	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		DLH
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						14.971.772		10.875.000		11.400.000		37.246.772	DLH
		Persentase Sampah yang Tertangani	Jumlah Sampah yang terangkut dibagi jumlah timbulan	Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	47,29	57,31		59,92		71,00		71,00		DLH
		Persentase Pengurangan Sampah	Jumlah sampah yang berkurang dibagi dengan jumlah timbulan	Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	14,00	17,92		23,15		29,00		29,00		DLH
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						3.343.977		3.377.417		3.478.739		10.200.133	DISDUKCAPIL
2.13.03	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						3.068.977		3.099.667		3.192.657		9.361.301	DISDUKCAPIL
		Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Jumlah KK tercetak/Jumlah KK x 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	91,67	94,00		96,00		98,00		98,00		DISDUKCAPIL
		Perekaman KTP elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk 17 tahun keatas dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	99,68	99,74		99,76		99,80		99,80		DISDUKCAPIL
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	21,80	60,00		70,00		80,00		80,00		DISDUKCAPIL
02.13.02	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						145.000		146.450		150.844		442.294	DISDUKCAPIL
		Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	93,10	95,50		96,00		96,50		96,50		DISDUKCAPIL

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase penduduk berakta kematian	Jumlah penduduk meninggal yang sudah memiliki akta kematian dibagi jumlah kematian dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	68,54	70,04		70,79		71,54		71,54		DISDUKCAPIL
02.13.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						130.000		131.300		135.239		396.539	DISDUKCAPIL
		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dibagi jumlah OPD dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	15,00	30,00		40,00		50,00		50,00		DISDUKCAPIL
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						8.078.000		12.044.050		13.421.472		33.543.522	DISPERMASDES
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA						1.970.000		4.200.000		4.600.000		10.770.000	DISPERMASDES
		Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik	Jumlah Desa yang memiliki sarana pemerintahan Desa (balai Desa bobot:40%, kantor Desa bobot 40% kantor BPD dan lembaga Desa bobot 20%) yang baik dibagi jumlah Desa	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa	55,23	65,23		70,23		80,23		80,23		DISPERMASDES
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						75.000		100.000		125.000		300.000	DISPERMASDES
		Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama dibagi jumlah Desa	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Des, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang	69,40	70,82		71,53		72,24		72,24		DISPERMASDES
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						5.128.000		6.830.000		7.755.000		19.713.000	DISPERMASDES

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	Jumlah Desa yang tertib dan baik dalam administrasi pengelolaan keuangan (bobot 50) dan asset Desa (bobot 50)	Persen; Tahunan; Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Permendagri 18 Tahun 2020	35,00	68,00		89,00		100,00		100,00		DISPERMASDES
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						905.000		914.050		941.472		2.760.522	DISPERMASDES
		Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	Jumlah KPMD, Posyandu, kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT yang aktif dibanding dengan jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DISPERMASDES
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						8.438.457		9.849.486		11.149.871		29.437.814	DINAS P3AP2KB
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						193.338		272.010		307.371		772.719	DINAS P3AP2KB
		TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun).	Dokumen; Tahunan; BPS	2,28	2,24		2,22		2,22		2,22		DINAS P3AP2KB
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						7.269.657		8.375.204		9.456.830		25.101.691	DINAS P3AP2KB
		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate) CPR	Jumlah peserta KB Aktif Modern dibagi jumlah PUS X 100%	Persen, bulanan, Laporan Dalap Kab	67,80	69,14		69,34		69,54		69,54		DINAS P3AP2KB
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi jumlah PUS X 100%	Persen; Tahun; IKU OPD	15,27	14,87		14,67		14,47		14,47		DINAS P3AP2KB

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						975.462		1.202.272		1.385.670		3.563.404	DINAS P3AP2KB
		Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui BKB , BKR, BKL dibagi jumlah sasaran (keluarga) dikali 100%	Persen ; bulanan ; Laporan Dalap Kab	21,58	21,79		21,89		22,00		22,00		DINAS P3AP2KB
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						15.300.066		15.606.100		16.074.283		46.980.449	DISHUB
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						15.300.066		15.606.100		16.074.283		46.980.449	DISHUB
		Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Perencanaan Lalu Lintas yang disusun dibanding dokumen yang dibutuhkan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0,00	30,00		60,00		100,00		100,00		DISHUB
		Persentase Rekomendasi Andalalin	Jumlah Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan dibanding jumlah pemohon dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	20,00	60,00		80,00		100,00		100,00		DISHUB
		Persentase perlintasan KA yang telah di lakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perlintasan KA yang telah di lakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dibanding jumlah perlintasan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	32,80	38,00		38,00		38,00		38,00		DISHUB
		Persentase Simpang APILL Standar	Jumlah Simpang APILL Standar dibanding jumlah jumlah APILL dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0,00	33,33		66,67		100,00		100,00		DISHUB
		Persentase Pengamanan Pengaturan Lalu Lintas	Jumlah Pengamanan Pengaturan Lalu Lintas dibanding jumlah tempat pengamanan pengaturan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DISHUB

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase Lokasi Titik Parkir Berizin	Jumlah Lokasi Titik Parkir Berizin dibanding jumlah seluruh titik parkir dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	65,33	82,00		90,33		100,00		100,00		DISHUB
		Persentase Juru Parkir Berizin	Jumlah Juru Parkir Berizin dibanding seluruh juru parkir dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	73,60	80,60		85,60		100,00		100,00		DISHUB
		Rasio fasilitasi penerbitan ijin trayek	Jumlah fasilitasi penerbitan ijin trayek yang dikeluarkan dibanding jumlah ijin trayek dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	76,00	85,00		87,00		90,00		90,00		DISHUB
		Persentase Pelanggaran Perizinan, Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Angkutan	Jumlah Pelanggaran Perizinan, Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Angkutan dibanding Jumlah Perizinan, Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Angkutan yang dikeluarkan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	35,00	25,00		20,00		20,00		20,00		DISHUB
		Persentase layanan terminal angkutan jalan	Jumlah sarana dan prasarana terminal angkutan jalan type c yang ada dibanding jumlah sarana prasarana terminal type c terstandar dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	31,00	35,00		37,00		39,00		39,00		DISHUB
		Persentase Kepemilikan Uji Kendaraan angkutan umum	Jumlah Kepemilikan Uji Kendaraan angkutan umum dibanding seluruh angkutan umum dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	77,80	82,00		84,00		87,00		87,00		DISHUB
		Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Jalan	Jumlah jalan memiliki Perlengkapan Jalan dibanding seluruh jalan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	34,49	65,00		77,00		90,00		90,00		DISHUB
		Persentase Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum)	Jumlah Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum) dibanding jumlah kebutuhan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	57,00	78,00		89,00		100,00		100,00		DISHUB

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						3.300.000		3.318.000		3.545.000		10.163.000	DINAS KOMINFO
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						1.500.000		1.500.000		1.545.000		4.545.000	DINAS KOMINFO
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebara informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dibagi jumlah penduduk dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2020	20,00	30,00		50,00		80,00		80,00		DINAS KOMINFO
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						1.800.000		1.818.000		2.000.000		5.618.000	DINAS KOMINFO
		Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK-nya dibagi total seluruh OPD dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	25,00	50,00		75,00		100,00		100,00		DINAS KOMINFO
		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	Jumlah perangkat daerah yang disediakan akses internet oleh kominfo dibagi total seluruh OPD dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	16,67	70,83		85,42		100,00		100,00		DINAS KOMINFO
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah seluruh layanan publik dikali	Persen; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2020	45,00	65,00		75,00		85,00		85,00		DINAS KOMINFO
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						865.304		873.457		1.183.500		2.922.261	DINAS DAGKOP UKM
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						50.000		50.000		51.500		151.500	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase Rekomendasi Usaha Simpan Pinjam yang terfasilitasi	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam dibagi dengan jumlah permohonan izin usaha simpan pinjam dikali seratus persen	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100		100		100		100		DINAS DAGKOP UKM

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						40.000		40.400		80.000		160.400	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase Koperasi Sehat dan cukup sehat	Jumlah Koperasi Predikat Sehat dan cukup sehat dibagi dengan Jumlah koperasi dikali 100	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	15,72	17,31		17,77		18,22		18,22		DINAS DAGKOP UKM
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						490.304		495.207		587.000		1.572.511	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase SDM Koperasi yang memiliki kompetensi	Jumlah SDM Koperasi yang memiliki sertifikat dibagi seluruh jumlah SDM koperasi keseluruhan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	5,82	17,72		26,07		35,18		35,18		DINAS DAGKOP UKM
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						35.000		35.350		55.000		125.350	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase Koperasi bermitra	Jumlah Koperasi yang bermitra dibagi seluruh jumlah koperasi non KSP dikali 100%	Persen; Kumulatif; IKU OPD	1,04	3,64		4,94		6,23		6,23		DINAS DAGKOP UKM
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						90.000		90.900		100.000		280.900	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra	Jumlah UMKM yang bermitra dibagi jumlah seluruh UMKM binaan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	2,63	4,21		4,73		5,26		5,26		DINAS DAGKOP UKM
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						160.000		161.600		310.000		631.600	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0,00	1,05		2,63		4,21		4,21		DINAS DAGKOP UKM
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						1.417.252		1.431.425		1.626.486		4.475.163	DINAS PMPTSP

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						170.357		172.061		220.000		562.418	DINAS PMPTSP
		Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi	Jumlah lokasi yang memiliki profil investasi dibagi jumlah lokasi potensial	Persen; Kumulatif; IKU OPD;	0,00	42,86		57,14		71,43		71,43		DINAS PMPTSP
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						316.250		319.413		328.995		964.657	DINAS PMPTSP
		Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	Jumlah calon investor yg berkomitmen tahun n di-1 kurangi jumlah calon investor yang berkomitmen tahun dibagi jumlah calon investor yg berkomitmen tahun n-1 dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD;	100,00	20,00		20,00		20,00		20,00		DINAS PMPTSP
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						536.311		541.674		557.924		1.635.909	DINAS PMPTSP
		Persentase ketepatan waktu perizinan yang ditetapkan sebelum batas waktu	Jumlah perizinan yang ditetapkan sesuai batas waktu dibagi jumlah pengusul	Persen; Tahunan; IKU OPD;	100	100		100		100		100		DINAS PMPTSP
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						330.000		333.300		419.567		1.082.867	DINAS PMPTSP
		Persentase Kepatuhan Perusahaan	Jumlah perusahaan yang patuh tahun n - jumlah calon perusahaan yang patuh tahun n-1 dibagi jumlah perusahaan yang patuh tahun n-1 dikali 100	Persen; Kumlatif; IKU OPD;	61,28	67,28		70,28		73,28		73,28		DINAS PMPTSP

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						64.334		64.977		100.000		229.311	DINAS PMPTSP
		Persentase data layanan yang termanfaatkan	Jumlah jenis layanan yang termanfaatkan dibagi jumlah jenis layanan yang dilayani x 100	Persen; Kumlatif; IKU OPD;	6,29	9,38		11,46		13,54		13,54		DINAS PMPTSP
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						6.323.769		6.344.269		6.751.982		19.420.020	DINAS PORAPAR
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						2.050.000		2.070.500		2.350.000		6.470.500	DINAS PORAPAR
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten dibagi Jumlah pemuda (umur	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	0,073	0,135		0,161		0,187		0,187		DINAS PORAPAR
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan orgaisasi sosial kemasyarakatan di	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	0,067	0,071		0,073		0,076		0,076		DINAS PORAPAR
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						4.273.769		4.273.769		4.401.982		12.949.520	DINAS PORAPAR
		Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga tk. Provinsi/nasional	Medali; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	61,00	70,00		75,00		80,00		80,00		DINAS PORAPAR
		Persentase Cabang Olahraga yang dibina	Jumlah Cabor yang dibina dibagi Jumlah Cabang Olahraga di Kabupaten Tegal	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	75,00	83,33		91,67		100,00		100,00		DINAS PORAPAR
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						120.000		130.000		140.000		390.000	DINAS KOMINFO

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL						120.000		130.000		140.000		390.000	DINAS KOMINFO
		Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia	Jumlah kebutuhan data statistik yang tersedia dibagi jumlah seluruh kebutuhan data statistik dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	38,15	52,36		59,47		66,57		66,57		DINAS KOMINFO
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						224.109		350.000		400.000		974.109	DINAS KOMINFO
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						224.109		350.000		400.000		974.109	DINAS KOMINFO
		Tingkat keamanan Informasi	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	40,62	50,00		60,00		75,00		75,00		DINAS KOMINFO
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1.140.000		1.155.900		1.190.577		3.486.477	DINAS DIKBUD
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						620.000		626.200		644.986		1.891.186	DINAS DIKBUD
		Persentase tradisi yang dikembangkan	Proporsi tradisi yang dikembangkan terhadap jumlah tradisi yang ada	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	61.11	65.11		67.11		69.11		69.11		DINAS DIKBUD
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						70.000		70.700		72.821		213.521	DINAS DIKBUD
		Persentase Seni dan Kesenian yang dibina	Proporsi seni dan kesenian yang dibina terhadap jumlah seni dan kesenian yang ada	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	54,55	76,77		87,88		100,00		100,00		DINAS DIKBUD
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						90.000		91.800		94.554		276.354	DINAS DIKBUD
		Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan	Proporsi sumber sejarah yang terdokumentasi terhadap jumlah	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	76,47	78.10		78.43		78.76		78.76		DINAS DIKBUD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						310.000		316.200		325.686		951.886	DINAS DIKBUD
		Terlestarikannya Cagar Budaya	Terlestarikannya cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah cagar budaya yang terdata dikali 100 %	Persen; Tahunan; Permendagri No.18 Tahun 2020	45,83	49.83		51.83		53.83		53.83		DINAS DIKBUD
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						50.000		51.000		52.530		153.530	DINAS DIKBUD
		Persentase museum yang terkelola	Proporsi jumlah museum yang dikelola terhadap jumlah museum yang ada	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	65.00	67.50		68.75		70.00		70.00		DINAS DIKBUD
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						468.024		535.553		551.619		1.555.196	DINAS ARPUS
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						468.024		535.553		551.619		1.555.196	DINAS ARPUS
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Survei/kajian kegemaran membaca masyarakat (variabel Permendagri No 18 Tahun 2020)	Angka/Skor; Tahunan; Permendagri 18/2020	47,91	52,00		54,00		56,00		56,00		DINAS ARPUS
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	Angka/Skor; Tahunan; Permendagri 18/2020	9,088	11,00		11,50		12,00		12,00		DINAS ARPUS
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						450.000		454.500		468.135		1.372.635	DINAS ARPUS
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						450.000		454.500		468.135		1.372.635	DINAS ARPUS
		Peningkatan nilai LAKE LKD	Nilai audit Kearsipan yang dikeluarkan oleh ANRI setiap tahun	Persen; Tahunan; PERKA ANRI 6/2019	73,00	87,00		89,00		91,00		91,00		DINAS ARPUS
		Persentase Perangkat Daerah yang bernilai LAKI Cukup	Jumlah PD yang diaudit oleh Dinas Arpus tata kelola kearsipannya setiap tahun dibagi jumlah seluruh PD Kabupaten Tegal dikali 100%	Persen; Kumulatif; t	0,00	20,83		25,00		29,17		29,17		DINAS ARPUS

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						25.924.628		27.387.914		29.010.941		82.323.484	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						3.330.104		3.363.405		3.523.314		10.216.823	DKPP
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						759.538		767.133		790.147		2.316.819	DKPP
		Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	Jumlah produksi perikanan tangkap (kg) meliputi jumlah hasil tangkapan ikan di laut dan di perairan umum daratan (PUD) di wilayah Kab. Tegal.	Kilogram; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020 Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	1.964.378	2.003.862		2.023.900		2.044.139		2.044.139		DKPP
		Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.)	Nilai produksi perikanan tangkap (Rp.000) meliputi jumlah nilai produksi perikanan hasil tangkapan di laut dan di perairan umum daratan (PUD) di wilayah Kab. Tegal.	Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	13.608.184	13.881.708		14.020.525		14.160.730		14.160.730		DKPP
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						2.193.469		2.215.404		2.281.866		6.690.738	DKPP
		Produksi Perikanan Budidaya (kg)	Jumlah hasil produksi perikanan budidaya meliputi budidaya perikanan air tawar dan payau (tambak) di wilayah Kabuapten Tegal	Kilogram; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	2.730.262	2.764.493		2.792.138		2.825.643		2.825.643		DKPP
		Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	Nilai hasil produksi perikanan budidaya meliputi budidaya perikanan air tawar dan payau (tambak) di wilayah Kabuapten Tegal	Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	145.642.227	148.291.680		150.431.397		153.024.735		153.024.735		DKPP
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						145.144		146.595		210.000		501.739	DKPP

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari <i>destructive fishing</i>	Jumlah perairan umum daratan (PUD) yang bebas desduktrive fishing dibagi jumlah total	Persen; Kumulatif; IKU OPD	11,11	55,56		77,78		100		100		DKPP
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						231.953		234.273		241.301		707.526	DKPP
		Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan meliputi pengasapan, pemindangan, penggaraman dan pengolahan hasil perikanan lainnya.	Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	5.478.639	5.492.344		5.503.329		5.517.087		5.517.087		DKPP
		Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	Nilai hasil produksi pengolahan hasil perikanan meliputi pengasapan, pemindangan, penggaraman dan pengolahan hasil perikanan lainnya.	Rupiah; Tahunan Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	131.189.142	131.517.312		131.780.347		132.109.798		132.109.798		DKPP
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						6.880.000		8.149.040		9.138.894		24.167.934	DISPORAPAR
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						4.980.000		5.549.040		6.438.894		16.967.934	DISPORAPAR
		Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	Jumlah DTW yang ditetapkan dibagi jumlah seluruh DTW yang beroperasi dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	78,33	85,00		90,00		95,00		95,00		DISPORAPAR
		Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Jumlah usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dibagi jumlah usaha pariwisata dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	69,00	79,00		84,00		89,00		89,00		DISPORAPAR
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						1.000.000		1.500.000		1.500.000		4.000.000	DISPORAPAR

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase DTW yang dipromosikan	Jumlah DTW yang dipromosikan dibagi jumlah seluruh DTW yang beroperasi dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	78,33	85,00		90,00		95,00		95,00		DISPORAPAR
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						900.000		1.100.000		1.200.000		3.200.000	DISPORAPAR
		Persentase SDM Pariwisata yang dibina	Jumlah SDM Pariwisata yang dibina dibagi jumlah SDM pariwisata dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	50	65		80		95		95		DISPORAPAR
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						11.874.980		11.992.730		12.349.512		36.217.222	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1.058.596		1.069.182		1.101.258		3.229.036	DINAS TANKP
		Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Rasio (%) luas serangan OPT yang tertangani / Luas Serangan OPT	Persen; Kumulatif; IKU OPD	89,80	89,90		89,93		90,00		90,00		DINAS TAN KP
		Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	Rasio (%) alokasi pupuk bersubsidi dibandingkan usulan dalam RDKK	Persen; Tahun, Permendagri 18 Th. 2020	63,00	65,00		67,00		70,00		70,00		DINAS TAN KP
		Luas Lahan Pertanian Organik	Luas pengembangan pertanian organik yang telah bersertifikat	Persen; Kumulatif; IKU OPD	2,00	2,00		2,00		5,00		5,00		DINAS TAN KP
		Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen	Luas Layanan alsintan pra panen / luas tanam komoditas pangan utama (padi)	Persen; Kumulatif; IKU OPD	62,72	62,98		63,24		63,50		63,50		DINAS TAN KP
		Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen	Luas Layanan alsintan pasca panen / luas panen komoditas pangan utama (padi)	Persen; Kumulatif; IKU OPD	15,51	16,98		19,45		22,01		22,01		DINAS TAN KP

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Produksi daging (kg)	Jumlah produksi daging meliputi daging ternak besar (Sapi, Kerbau), ternak kecil (Kambing, Domba), Unggas dan aneka ternak lainnya di Kabupaten Tegal	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	11.284.734	11.511.557		11.626.673		11.742.939		11.742.939		DINAS TAN KP
		Produksi Telur (kg.)	Jumlah produksi telur meliputi telur ayam, bebek, puyuh dan unggas lainnya di kabupaten Tegal	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	10.760.493	10.976.779		11.086.547		11.197.412		11.197.412		DINAS TAN KP
		Produksi Susu (kg.)	Jumlah produksi susu segar meliputi susu sapi dan susu kambing di wilayah Kabupaten Tegal.	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	604.664	616.818		622.986		629.216		629.216		DINAS TANKP
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						10.058.374		10.158.958		10.463.726		30.681.058	DINAS TAN KP
		Indeks pertanaman	Luas lahan yang ditanami padi dalam 1 tahun / luas baku lahan	Indeks; Tahunan; IKU OPD	1,52	1,62		1,66		1,70		1,70		DINAS TAN KP
		Akseibilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha)	Panjang Jalan Usaha Tani : Luas Lahan Pertanian	Persen; Kumulatif; IKU OPD	2,60	3,34		3,70		4,11		4,11		DINAS TAN KP
		Luas Lahan Sawah Lestari	Luas LP2B : Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan 36.088 Ha dan akan dipertahankan sampai akhir periode perencanaan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS TAN KP
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT						288.250		291.133		299.866		879.249	DINAS TAN KP

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase Ternak terkendali status kesehatannya	Jumlah Ternak peternakan rakyat terkendali status kesehatannya dibagi proyeksi jumlah ternak peternakan rakyat yang sakit	Persen ; Tahunan; IKU OPD	31,37	5,60		5,60		5,60		5,60		DINAS TAN KP
		Persentase Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH	Jumlah pengawasan peredaran produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utruh dan Halal) di wilayah Kabupaten Tegal yang dilakukan secara rutin dibagi jumlah pengawasan yang seharusnya dikali 100 Persen	Persen ; Tahunan; IKU OPD	100	100		100		100		100		DINAS TAN KP
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						90.000		90.900		93.627		274.527	DINAS TAN KP
		Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Rasio luas serangan OPT / Luas Tanam Komoditas pangan utama (padi)	Persen; Tahunan; IKU OPD	< 2,5	< 2,5		< 2,5		< 2,5		< 2,5		DINAS TAN KP
		Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi	Rasio luas tanam padi yang mengaplikasikan APH / Luas Tanam pada tahun n	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	1,5		2		2,5		2,5		DINAS TAN KP
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						379.760		382.558		391.034		1.153.352	DINAS TAN KP
		Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan	Jumlah Penyuluh swadaya yang akan ditingkatkan pengetahuannya terhadap dasar-dasar penyuluhan pertanian / jumlah seluruh penyuluh swadaya. Jumlah penyuluh swadaya 150 orang)	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	27		20		20		100		DINAS TAN KP

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula Ke Lanjut	100*(X-X)/X. Jumlah Kel. Tani Kelas Pemula kondisi awal:	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	2,51		2,57		2,64		11,94		DINAS TAN KP
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						2.915.000		2.948.950		3.037.419		8.901.369	DINAS DAGKOP UKM
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						20.000		20.000		20.600		60.600	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase pemberian rekomendasi izin yang terfasilitasi	Jumlah rekomendasi izin usah dibagi jumlah pengajuan permohonan usaha dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2020	100,00	100,0		100,00		100,00		100,00		DINAS DAGKOP UKM
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						2.500.000		2.500.000		2.575.000		7.575.000	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase Pasar direhabilitasi	Jumlah pasar yang direhabilitasi dibagi jumlah pasar seluruh dikabupaten tegal dikali 100 persen	Permendagri No.70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan & Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan & Toko Modern	50,00	65,38		76,92		88,46		88,46		DINAS DAGKOP UKM
		Persentase pasar e-ritribusi	Jumlah pasar yang sudah menggunakan e-retribusi dibagi jumlah seluruh pasar di kabupaten tegal	Persen; Tahunan; IKU OPD	7,69	46,15		65,38		84,62		84,62		DINAS DAGKOP UKM
		Persentase Sarana dan Prasaran Pendistribusian yang terkelola dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana pengelola pasar dibagi total pengelola pasar keseluruhan	Persen; Tahun; IKU OPD	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS DAGKOP UKM
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						95.000		95.950		98.829		289.779	DINAS DAGKOP UKM

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase harga dan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabil	Standar deviasi koefisien harga antar waktu dibagi harga rata-rata tahunan dikali 100%	Persen; Tahunan: IKU OPD	<9%	<9%		<9%		<9%		<9%		DINAS DAGKOP UKM
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						-		30.000		30.900		60.900	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase Laju Nilai Ekspor	Jumlah selisih Nilai Ekspor tahun berjalan di banding Jumlah nilai ekspor tahun sebelumnya dikali 100	Persen; Tahun; IKU OPD	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		DINAS DAGKOP UKM
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						150.000		151.500		156.045		457.545	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase Pedagang Tertib Ukur	Jumlah UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) milik pedagang yang telah ditera/tera ulang dibagi jumlah total UTTP yang dimiliki pedagang dikali 100%	Persentase; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	27,95	35,01		50,01		60,01		60,01		DINAS DAGKOP UKM
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						150.000		151.500		156.045		457.545	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase laju peningkatan nilai penjualan produk dalam negeri	Jumlah nilai penjualan produk dalam negeri tahun berjalan dikurangi nilai penjualan tahun sebelumnya dibagi nilai penjualan tahun sebelumnya dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		DINAS DAGKOP UKM
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						852.009		860.529		886.345		2.598.883	DISPERINAKER
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						800.000		808.000		832.240		2.440.240	DISPERINAKER

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	Persen; Kumulatif: Permendagri 18/2019	60,00	70,00		80,00		100,00		100,00		DISPERINAKER
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA						17.929		18.108		18.652		54.689	DISPERINAKER
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah rekomtek IUI yang dikeluarkan dibagi jumlah pemohon dikali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2019	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DISPERINAKER
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						34.080		34.421		35.453		103.954	DISPERINAKER
		Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	Jumlah industri yang masuk Siinas dibagi Total Jumlah Industri	Persen; Kumulatif: Permendagri 18/2019	20,00	60,00		80,00		100,00		100,00		DISPERINAKER
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						72.535		73.260		75.458		221.254	DISPERINAKER
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						72.535		73.260		75.458		221.254	DISPERINAKER
		Transmigran yang ditempatkan	Penempatan Transmigran sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Persen; Tahunan; UU No. 29 Tahun 2009	100	100		100		100		100		DISPERINAKER
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						50.768.538		51.476.223		53.020.510		155.265.271	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						34.820.538		35.368.743		36.429.806		106.619.087	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						34.047.306		34.587.779		35.625.412		104.260.497	SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesra nilai SAKIP B (Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Pemerintahan dan Kesra	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 12/2015; IKU OPD	70,00	75,03		80,00		85,00		85,00		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Pemerintahan dan Kesra yang memperoleh nilai IKM Baik dibagi jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Pemerintahan dan Kesra	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD	79,00	84,00		89,00		94,00		94,00		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Indeks RB Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra nilai B (Cukup Baik)	Jumlah OPD Rumpun Pemerintahan Kesra nilai RB B dibagi jumlah OPD rumpun Pemerintahan Kesra	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 26/2020; IKU OPD	0,00	25,00		50,00		75,00		75,00		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	Jumlah pembentukan Perda yang terselesaikan sampai Raperda dibanding jumlah pembentukan Perda yang dibahas	Persen; Tahunan: Permendagri 120/2018	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Hukum dan HAM yang terfasilitasi sampai dengan pengadilan tingkat pertama	Persen; Tahunan: Permendagri 12 Tahun 2014	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						773.232		780.964		804.393		2.358.590	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan SAKIP dengan nilai B (Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang memperoleh nilai SAKIP B (Baik) dibagi jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 12/2015; IKU OPD	80,00	82,50		85,00		87,50		87,50		SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai standar (IKM Baik)	Jumlah OPD rumpun perekonomian pembangunan nilai IKM sesuai standard baik dibagi jumlah OPD rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD	67,00	80,00		90,00		100,00		100,00		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi	Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 26/2020;	0,00	25,00		50,00		75,00		75,00		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa terselesaikan dibagi dengan jumlah pengadaan barang jasa yang masuk tahun n	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2020	100	100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
		Level Tingkat Maruritas UKPBJ terpenuhi	Level Maturitas UKPBJ Setelah berkas ajuan peningkatan level disetujui oleh LKPP	Level; Tahunan: Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019	1	3		3		3		4		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi	tolak ukur pedoman tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan LPSE Setelah berkas ajuan peningkatan level disetujui oleh LKPP	Tingkat Standarisasi LPSE, Tahunan, Perka LKPP 9 Tahun 2015; IKU OPD	12	14		15		16		16		SEKRETARIAT DAERAH
4.02	SEKRETARIAT DPRD						15.948.000		16.107.480		16.590.704		48.646.184	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						15.948.000		16.107.480		16.590.704		48.646.184	SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase Integrasi Renja DPRD ke dalam Renja SEKRETARIAT DPRD	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	95	100		100		100		100		SEKRETARIAT DPRD
5	UNSUR PENUNJANG	URUSAN PEMERINTAHAN					19.388.850		19.582.739		20.722.365		59.693.954	
5.01	PERENCANAAN						3.084.500		3.115.345		3.938.000		10.137.845	BAPPEDA DAN LITBANG
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						1.199.500		1.211.495		1.488.000		3.898.995	BAPPEDA DAN LITBANG
		Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	Jumlah dokumen perencanaan disusun sesuai tahapan dibagi jumlah dokumen yang seharusnya disusun dikali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		BAPPEDA DAN LITBANG
		Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi dikali	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	75,00	75,00		80,00		85,00		85,00		BAPPEDA DAN LITBANG
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						1.885.000		1.903.850		2.450.000		6.238.850	BAPPEDA DAN LITBANG

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah substansi renja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selaras dengan Renstra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibagi jumlah seluruh substansi renja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dinilai x 100	Persen; Tahunan; IKU PD	91,22	91,56		91,77		91,98		95,00		BAPPEDA DAN LITBANG
		Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah substansi renja bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan Renstra bidang Perekonomian dan SDA dibagi jumlah seluruh substansi renja bidang Perekonomian dan SDA yang dinilai x 100	Persen; Tahunan; IKU PD	92,88	93,12		93,17		93,23		93,23		BAPPEDA DAN LITBANG
		Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah substansi renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang selaras dengan Renstra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibagi jumlah seluruh substansi renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang	Persen; Tahunan; IKU PD	93,02	93,24		93,45		93,59		93,59		BAPPEDA DAN LITBANG
5.02	KEUANGAN						8.575.184		8.660.936		8.408.036		25.644.156	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						2.576.740		2.602.507		2.680.583		7.859.830	BPKAD
		Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan	Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020	100	100		100		100		100		BPKAD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D	SP2D diterbitkan tepat waktu	Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020	100	100		100		100		100		BPKAD
		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD	Perda APBD dan Perbup Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan	Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020	100	100		100		100		100		BPKAD
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						3.474.277		3.509.020		2.720.000		9.703.297	BPKAD
		Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu	Laporan BMD sesuai dengan laporan keuangan dan disusun sebelum penyusunan LKPD	Persen; Tahunan; Permendagri 19/2016	62,50	70,00		75,00		80,00		80,00		BPKAD
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						2.524.167		2.549.409		3.007.454		8.081.029	BAPPENDA
		Rasio PAD	Jumlah PAD dibagi Jumlah APBD Non Migas dikali 100%	Persen, Tahunan; IKU OPD	14,09	15,06		15,15		15,27		15,27		BAPPENDA
		Rasio Piutang Pajak Daerah	Jumlah piutang tertagih dibagi jumlah piutang dikali 100%	Persen, Tahunan; IKU OPD	66,26	95,00		98,90		99,10		99,10		BAPPENDA
		Rasio Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah dibagi jumlah PAD dikali 100%	Persen, Tahunan; IKU OPD	30,63	30,52		30,68		31,00		31,00		BAPPENDA
5.03	KEPEGAWAIAN						4.000.000		4.040.000		4.161.200		12.201.200	BKD
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						4.000.000		4.040.000		4.161.200		12.201.200	BKD
		Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	Jumlah ASN mendapatkan hukuman disiplin dibanding jumlah ASN dikali 100	Persen, Tahunan; IKU OPD	0,12	0,12		0,11		0,11		0,10		BKD
		Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	Jumlah jabatan struktural terisi dibanding jumlah formasi jabatan struktural dikali	Persen, Tahunan; IKU OPD	87,97	94,77		95,42		96,08		96,08		BKD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase jabatan jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya	Jumlah jabatan struktural/jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi dibanding jumlah jabatan struktural dan formasi jabatan fungsional (non guru/non kesehatan) dikali seratus	Persen, Tahunan; IKU OPD	35,76	41,82		44,85		47,88		47,88		BKD
		Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)	Jumlah pegawai PT dan Menengah dibanding jumlah pegawai pendidikan SLTA kebawah	Persen, Tahunan; IKU OPD	110,04	259,85		288,10		318,87		318,87		BKD
		Rasio pegawai fungsional (%)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan nakes) dibanding jumlah seluruh pegawai (diluar guru dan nakes (%))	Persen, Tahunan; IKU OPD	9,87	15,28		15,68		16,23		16,23		BKD
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Jumlah Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (diluar guru dan nakes) dibanding jumlah seluruh jabatan fungsional tidak termasuk guru dan nakes	Persen, Tahunan; IKU OPD	93,50	93,26		92,69		93,05		93,05		BKD
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						2.410.395		2.434.499		2.507.534		7.352.428	BKD
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						2.410.395		2.434.499		2.507.534		7.352.428	BKD
		Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis 20 jam/tahun dibanding jumlah PNS dikali seratus	Persen; Kumulatif; PP no.11 tahun 2017	47,49	70,00		75,01		80,00		80,00		BKD
		Persentase PNS mengikuti seminar/ workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	Jumlah PNS mengikuti seminar/workshop/sej enis sesuai dengan tupoksi jabatan dibagi seluruh PNS dikali 100	Persen; Tahunan; PP no.11 tahun 2017	33,40	40,00		45,01		50,00		50,00		BKD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.318.771		1.331.959		1.707.595		4.358.325	BAPPEDA DAN LITBANG
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						1.318.771		1.331.959		1.707.595		4.358.325	BAPPEDA DAN LITBANG
		Persentase hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Jumlah kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah kelitbangan yang dihasilkan	Persen; Tahunan; IKU OPD	65,00	72,50		73,44		87,50		87,50		BAPPEDA DAN LITBANG
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						1.476.240		1.491.002		1.535.732		4.502.975	INSPEKTORAT
6.01	INSPEKTORAT DAERAH						1.476.240		1.491.002		1.535.732		4.502.975	INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						764.240		771.882		795.039		2.331.161	INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	Jumlah TLHP dibagi Jumlah Rekomendasi HP	Persen; Tahunan; IKU OPD	91,70	92,00		92,00		92,00		92,00		INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi	Jumlah TLHP dibagi Jumlah Rekomendasi HP	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten	Jumlah TLHP dibagi Jumlah Rekomendasi HP	Persen; Tahunan; IKU OPD	39,02	60,00		70,00		80,00		80,00		INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						712.000		719.120		740.694		2.171.814	INSPEKTORAT
		Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal	Jumlah PD Berpredikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian Internal dibagi jumlah seluruh PD	Persen; Tahunan; IKU OPD	16,67	16,67		16,67		16,67		16,67		INSPEKTORAT
		Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah	Jumlah PD memenuhi target IKU dibagi jumlah seluruh PD	Persen; Tahunan; IKU OPD	60,41	66,66		70,83		75,00		75,00		INSPEKTORAT

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	Jumlah PD yang menyajikan laporan keuangan secara akuntabel dibagi Jumlah seluruh PD	Persen, Tahunan, PP 8 Tahun 2006	81,25	85,41		89,58		93,75		93,75		INSPEKTORAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN						11.337.174		9.321.824		9.349.824		30.008.822	KECAMATAN
7.01	KECAMATAN						11.337.174		9.321.824		9.349.824		30.008.822	KECAMATAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN ADIWERNA
		IKM Kecamatan Adiwerna	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	76,37	78,87		79,87		80,87		80,87		KECAMATAN ADIWERNA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN BALAPULANG
		IKM Kecamatan Balapulang	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	79,29	81,79		82,79		83,79		83,79		KECAMATAN BALAPULANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN BOJONG
		IKM Kecamatan Bojong	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	79,62	82,12		83,12		84,12		84,12		KECAMATAN BOJONG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN BUMIJAWA
		IKM Kecamatan Bumijawa	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	87,53	90,03		91,03		92,03		92,03		KECAMATAN BUMIJAWA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		45.000		45.000		135.000	KECAMATAN DUKUHTURI
		IKM Kecamatan Dukuhwaru	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	79,37	81,87		82,87		83,87		83,87		KECAMATAN DUKUHTURI

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN DUKUHWARU
		IKM Kecamatan Dukuhturi	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	77,44	79,94		80,94		81,94		81,94		KECAMATAN DUKUHWARU
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN JATINEGARA
		IKM Kecamatan Jatinegara	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	79,70	82,20		83,20		84,20		84,20		KECAMATAN JATINEGARA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN KEDUNGABNTEN G
		IKM Kecamatan Kedungbanteng	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	82,00	84,00		85,00		86,00		86,00		KECAMATAN KEDUNGABNTEN G
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN KRAMAT
		IKM Kecamatan Kramat	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	78,98	81,48		82,48		83,48		83,48		KECAMATAN KRAMAT
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN LEBAKSIU
		IKM Kecamatan Lebaksiu	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	77,25	81,25		82,25		83,25		83,25		KECAMATAN LEBAKSIU
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		39.624		39.624		124.248	KECAMATAN MARGASARI
		IKM Kecamatan Margasari	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	77,40	79,90		80,90		81,90		81,90		KECAMATAN MARGASARI

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN PAGERBARANG
		IKM Kecamatan Pagerbarang	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	77,63	80,13		81,13		82,13		82,13		KECAMATAN PAGERBARANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN PANGKAH
		IKM Kecamatan Pangkah	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	78,74	81,24		82,24		83,24		83,24		KECAMATAN PANGKAH
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN SLAWI
		IKM Kecamatan Slawi	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	79,67	82,17		83,17		84,17		84,17		KECAMATAN SLAWI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN SURADADI
		IKM Kecamatan Suradadi	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	79,76	82,26		83,26		84,26		84,26		KECAMATAN SURADADI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN TALANG
		IKM Kecamatan Talang	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	73,20	75,70		76,70		77,70		77,70		KECAMATAN TALANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN TARUB
		IKM Kecamatan Tarub	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	80,55	83,05		84,05		85,05		85,05		KECAMATAN TARUB

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000		40.000		40.000		125.000	KECAMATAN WARUREJA
		IKM Kecamatan Warureja	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	77,40	79,90		80,90		81,90		81,90		KECAMATAN WARUREJA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN ADIWERNA
		Persentase desa mandiri Kecamatan Adiwerna	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,00		4,76		4,76		4,76		KECAMATAN ADIWERNA
		Persentase desa Maju Kecamatan Adiwerna	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	9,52	9,52		14,29		14,29		14,29		KECAMATAN ADIWERNA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN BALAPULANG
		Persentase desa mandiri Kecamatan Balapulang	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	5,00		9,52		9,52		9,52		KECAMATAN BALAPULANG
		Persentase desa maju Kecamatan Balapulang	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	5,00	9,52		9,52		15,00		15,00		KECAMATAN BALAPULANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN BOJONG
		Persentase desa mandiri Kecamatan Bojong	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	12,00	0,12		0,18		0,18		0,18		KECAMATAN BOJONG
		Persentase desa maju Kecamatan Bojong	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,29	0,29		0,35		0,35		0,35		KECAMATAN BOJONG

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN BUMIJAWA
		Persentase desa mandiri Kecamatan Bumijawa	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,00		5,56		11,11		11,11		KECAMATAN BUMIJAWA
		Persentase desa maju Kecamatan Bumijawa	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	11,11	16,67		22,22		37,78		37,78		KECAMATAN BUMIJAWA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		226.000		248.000		594.000	KECAMATAN DUKUHTURI
		Persentase desa mandiri Kecamatan Dukuhwaru	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,00		10,00		10,00		10,00		KECAMATAN DUKUHTURI
		Persentase desa maju Kecamatan Dukuhwaru	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	10,00	10,00		10,00		20,00		20,00		KECAMATAN DUKUHTURI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN DUKUHWARU
		Persentase desa mandiri Kecamatan Dukuhhuri	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,00		5,56		5,56		5,56		KECAMATAN DUKUHWARU
		Persentase desa maju Kecamatan Dukuhhuri	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	5,56	5,56		11,11		16,67		16,67		KECAMATAN DUKUHWARU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN JATINEGARA
		Persentase desa mandiri Kecamatan Jatinegara	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	6,00		6,00		6,00		6,00		KECAMATAN JATINEGARA

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase desa maju Kecamatan Jatinegara	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	6,00	12,00		12,00		12,00		12,00		KECAMATAN JATINEGARA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN KEDUNGABNTEN G
		Persentase desa mandiri Kecamatan Kedungbanteng	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,10		0,10		0,10		0,10		KECAMATAN KEDUNGABNTEN G
		Persentase desa maju Kecamatan Kedungbanteng	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,00		0,10		0,10		0,10		KECAMATAN KEDUNGABNTEN G
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.391.753		1.090.000		1.090.000		3.571.753	KECAMATAN KRAMAT
		Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Kramat	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	5,26		5,26		5,26		5,26		KECAMATAN KRAMAT
		Persentase desa/kelurahan maju Kecamatan Kramat	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	16,00	16,00		26,00		26,00		26,00		KECAMATAN KRAMAT
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN LEBAKSIU
		Persentase desa mandiri Kecamatan Lebaksiu	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	7,69	7,69		7,69		15,38		15,38		KECAMATAN LEBAKSIU
		Persentase desa Maju Kecamatan Lebaksiu	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	15,00	15,00		23,00		23,00		23,00		KECAMATAN LEBAKSIU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		35.300		35.300		190.600	KECAMATAN MARGASARI

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase desa mandiri Kecamatan Margasari	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	8,00	8,00		15,00		15,00		15,00		KECAMATAN MARGASARI
		Persentase desa maju Kecamatan Margasari	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	46,00	46,00		54,00		62,00		62,00		KECAMATAN MARGASARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN PAGERBARANG
		Persentase desa mandiri Kecamatan Pagerbarang	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,00		8,00		8,00		8,00		KECAMATAN PAGERBARANG
		Persentase desa maju Kecamatan Pagerbarang	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	8,00	16,00		24,00		30,00		30,00		KECAMATAN PAGERBARANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN PANGKAH
		Persentase desa mandiri Kecamatan Pangkah	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,00		4,00		4,00		4,00		KECAMATAN PANGKAH
		Persentase desa Maju Kecamatan Pangkah	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	4,00	4,00		9,00		9,00		9,00		KECAMATAN PANGKAH
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						5.088.469		5.030.000		5.030.000		15.148.469	KECAMATAN SLAWI
		Persentase desa mandiri Kecamatan Slawi	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	20,00		20,00		40,00		40,00		KECAMATAN SLAWI
		Persentase desa maju Kecamatan Slawi	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	60,00	60,00		80,00		80,00		80,00		KECAMATAN SLAWI

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN SURADADI
		Persentase desa mandiri Kecamatan Suradadi	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,00		9,00		9,00		9,00		KECAMATAN SURADADI
		Persentase desa maju Kecamatan Suradadi	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	9,00	18,00		18,00		18,00		18,00		KECAMATAN SURADADI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN TALANG
		Persentase desa mandiri Kecamatan Talang	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	0,00		0,00		5,26		5,26		KECAMATAN TALANG
		Persentase desa maju Kecamatan Talang	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	5,26	60.000	5,26		0,11		0,11		KECAMATAN TALANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		60.000		60.000		240.000	KECAMATAN TARUB
		Persentase desa mandiri Kecamatan Tarub	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2	0,00	0,00		5,00		5,00		5,00		KECAMATAN TARUB
		Persentase desa maju Kecamatan Tarub	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2	20,00	20,00		25,00		25,00		25,00		KECAMATAN TARUB
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.000		30.000		30.000		180.000	KECAMATAN WARUREJA
		Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Warureja	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	0,00	8,00		8,00		17,00		17,00		KECAMATAN WARUREJA

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase desa/kelurahan Maju Kecamatan Warureja	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTT rans Nomor 2 Tahun 2016	17,00	17,00		25,00		33,00		33,00		KECAMATAN WARUREJA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN ADIWERNA
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Adiwerna	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN ADIWERNA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN BALAPULANG
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Balapulang	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN BALAPULANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN BOJONG
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN BOJONG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN BUMIJAWA
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bumijawa	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN BUMIJAWA

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN DUKUHTURI
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhwaru	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	75	80		85		90		90		KECAMATAN DUKUHTURI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN DUKUHWARU
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhuturi	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN DUKUHWARU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN JATINEGARA
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Jatinegara	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN JATINEGARA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN KEDUNGABNTEN G
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kedungbanteng	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	81	82		83		84		84		KECAMATAN KEDUNGABNTEN G
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN KRAMAT
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kramat	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN KRAMAT

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN LEBAKSIU
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	70	75		80		85		85		KECAMATAN LEBAKSIU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		21.700		21.700		73.400	KECAMATAN MARGASARI
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Margasari	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN MARGASARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN PAGERBARANG
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pagerbarang	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN PAGERBARANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN PANGKAH
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pangkah	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN PANGKAH
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN SLAWI

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Slawi	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN SLAWI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN SURADADI
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Suradadi	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN SURADADI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN TALANG
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Talang	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN TALANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		25.000		25.000		80.000	KECAMATAN TARUB
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN TARUB
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30.000		30.000		30.000		90.000	KECAMATAN WARUREJA
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Warureja	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	82	83		84		85		85		KECAMATAN WARUREJA

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						100.000		20.000		20.000		140.000	KECAMATAN ADIWERNA
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Adiwerna	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN ADIWERNA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						100.016		20.000		20.000		140.016	KECAMATAN BALAPULANG
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN BALAPULANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						42.450		20.000		20.000		82.450	KECAMATAN BOJONG
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN BOJONG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						39.594		20.000		20.000		79.594	KECAMATAN BUMIJAWA
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bumijawa	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN BUMIJAWA

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						45.377		84.000		90.000		219.377	KECAMATAN DUKUHTURI
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhturu	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN DUKUHTURI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						22.597		20.000		20.000		62.597	KECAMATAN DUKUHWARU
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhturi	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN DUKUHWARU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						61.935		20.000		20.000		101.935	KECAMATAN JATINEGARA
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Jatinegara	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN JATINEGARA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.878		20.000		20.000		102.878	KECAMATAN KEDUNGBANTEN G
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kedungbanteng	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	80	82		83		84		84		KECAMATAN KEDUNGBANTEN G

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						58.152		20.000		20.000		98.152	KECAMATAN KRAMAT
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kramat	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN KRAMAT
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						20.000		20.000		20.000		60.000	KECAMATAN LEBAKSIU
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN LEBAKSIU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						57.063		20.000		20.000		97.063	KECAMATAN MARGASARI
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Margasari	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN MARGASARI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						69.972		20.000		20.000		109.972	KECAMATAN PAGERBARANG
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN PAGERBARANG

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						46.181		20.000		20.000		86.181	KECAMATAN PANGKAH
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pangkah	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN PANGKAH
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						112.849		20.000		20.000		152.849	KECAMATAN SLAWI
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN SLAWI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						20.000		20.000		20.000		60.000	KECAMATAN SURADADI
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Suradadi	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN SURADADI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						56.620		20.000		20.000		96.620	KECAMATAN TALANG
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Talang	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN TALANG

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						53.265		20.000		20.000		93.265	KECAMATAN TARUB
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN TARUB
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						68.003		20.000		20.000		108.003	KECAMATAN WARUREJA
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Warureja	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/reliasasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		KECAMATAN WARUREJA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN ADIWERNA
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Adiwerna	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	50,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN ADIWERNA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN BALAPULANG
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	70,0		90,000		100,00		100,00		KECAMATAN BALAPULANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN BOJONG

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN BOJONG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN BUMIJAWA
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bumijawa	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		84,000		100,00		100,00		KECAMATAN BUMIJAWA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						40.000		10.000		10.000		60.000	KECAMATAN DUKUHTURI
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhwaru	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	50,0		60,000		70,00		70,00		KECAMATAN DUKUHTURI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN DUKUHWARU
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	50,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN DUKUHWARU
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN JATINEGARA
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN JATINEGARA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN KEDUNGABNTEN G
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kedungbanteng	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN KEDUNGABNTEN G

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN KRAMAT
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kramat	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	30,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN KRAMAT
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN LEBAKSIU
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		95,00		95,00		KECAMATAN LEBAKSIU
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		5.200		5.200		40.400	KECAMATAN MARGASARI
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Margasari	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	50,00	89,0		100,000		100,00		100,00		KECAMATAN MARGASARI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN PAGERBARANG
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pagerbarang	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN PAGERBARANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN PANGKAH
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pangkah	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN PANGKAH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN SLAWI
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Slawi	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN SLAWI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN SURADADI
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Suradadi	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN SURADADI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN TALANG
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Talang	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN TALANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN TARUB
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Tarub	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN TARUB
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.000		50.000		50.000		130.000	KECAMATAN WARUREJA
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Warureja	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	35,00	68,0		89,000		100,00		100,00		KECAMATAN WARUREJA
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						3.960.452		2.517.769		7.256.121		13.734.342	BADAN KESBANGPOL

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						3.960.452		2.517.769		7.256.121		13.734.342	BADAN KESBANGPOL
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						408.040		408.040		420.281		6.859.784	BADAN KESBANGPOL
		Presentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Survey kepada masyarakat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	80,42	86,66		88,66		90,66		90,66		BADAN KESBANGPOL
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						3.078.790		1.609.578		3.320.684		9.587.842	BADAN KESBANGPOL
		Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik	Jumlah parpol yang menyelenggarakan pendidikan politik dibagi jumlah parpol di kali 100,	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		BADAN KESBANGPOL
		Persentase lembaga penddiikan sma/smk dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik	jumlah lembaga pendidikan sma/smkdan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik dibagi seluruh sma/smk dan PT	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	35,40		53,10		70,80		70,80		BADAN KESBANGPOL
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						180.264		204.020		210.141		774.689	BADAN KESBANGPOL
		Persentase Ormas yang Terbina	Pembinaan Ormas secara oftimal	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	80,00	90,00		100,00		100,00		100,00		BADAN KESBANGPOL

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						156.550		158.116		162.859		711.120	BADAN KESBANGPOL
		Persentase Konflik yang tertangani	Jumlah konflik yang tertangani di bagi dengan kejadian konflik di kali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	97,00	100,00		100,00		100,00		100,00		BADAN KESBANGPOL
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						136.808		138.015		3.142.155		3.553.786	BADAN KESBANGPOL
		Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani	Jumlah gangguan yang tertangani dibagi jumlah gangguan di kali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00		BADAN KESBANGPOL
TOTAL PAGU							2.288.101.130		2.292.182.760		2.389.489.540		7.839.317.252	

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021